

Pariwisata Pelabuhan Ratu Jawa Barat Dilihat Dari Aspek Lingkungan Hidup

Sri Sunarti, S.Par, M.MPar

srisunarti80@gmail.com, Dosen Pariwisata, FIB_UMGo, Jl.Prof Mansoer Pateda, Indonesia

Abstract

Tourism is one of the sources of foreign exchange, and so with the tourism of Pelabuhan Ratu beach which one of the revenue resources (PAD) of Suka Bumi regency. In the development of tourism destination object, Pelabuhan Ratu also determined by the environment aspect. In this research, method of research that used is an observation method. While the resource of the data derived from primer and secondary data. The primary data obtained from the local government sources. While the secondary data obtained from the literature or books and scientific journals. Based on the result of the research about the role of environment aspects, in order to preserve the environmental sustainability of Pelabuhan Ratu beach itself, so the development of tourism in Pelabuhan Ratu can be one of the sustainable development that can be approve continuously carried out in every time. One of the effort that can be done by the government in the development of Pelabuhan Ratu based on environment aspects is to determine the tourism development policy in accordance with the environment management which defined in national intermediate development planning.

Keywords: *development, tourism, Pelabuhan Ratu, environment.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia pariwisata (*tourism*) saat ini bukan hal baru lagi bagi setiap daerah di Indonesia yang secara nyata menempatkan bisnis pariwisata sebagai salah satu sumber Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). Sejak semula pemerintah Indonesia pada umumnya dan pemerintah daerah khususnya telah menyadari karakter khas dan sifat multi dimensi dari kegiatan bisnis pariwisata.

Kemajuan teknologi dan perkembangan yang begitu pesat terhadap ilmu pengetahuan setidaknya membawa peletakan devisa sebagai orientasi kebijakan pariwisata telah menjebak bisnis pariwisata menjadi suatu bentuk kegiatan yang sangat ambisius, massal (*mass tourism*), dan akhirnya *eksploitatif* dan tidak rasional. Kegiatan bisnis pariwisata didasarkan pada pendekatan pertumbuhan optimal (*optimum growth*) yang sangat mendorong kehancuran potensi pariwisata, seperti sikap dan perilaku masyarakat, lingkungan, budaya.

Seluruh kegiatan bisnis pariwisata diarahkan pada pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, tanpa memperhitungkan kelanjutan kegiatan tersebut. Masalah demikian tentu tidak dapat dibiarkan, apabila kita menginginkan bisnis pariwisata tetap mempertahankan sifat originalnya pariwisata sesuai dengan karakter aslinya yakni lingkungan hidup, sikap perilaku masyarakat dan tentu budaya itu sendiri.

Kegiatan ekonomi pariwisata telah menjadi ancaman bagi sebagian orang, termasuk wisatawan asing yang mencintai keaslian, kualitas lingkungan hidup, nilai-nilai moral, sosial budaya dan keterlanjutan. Kegiatan bisnis pariwisata telah mendorong transformasi lahan secara besar-besaran, pengalihan fungsi lahan pertanian yang secara produktif maupun kawasan yang menyimpan nilai historis, sosio-kultural yang sangat unik, menjadi sentra-sentra kegiatan bisnis pariwisata.

Pada dasarnya kegiatan bisnis pariwisata secara esensial dan obyektif merupakan kegiatan perdagangan jasa yang berbasis pada potensi-potensi ekonomi dan non ekonomi, mulai dari sumber daya alam sampai sumber daya sosial budaya masyarakat di mana kegiatan tersebut dilaksanakan. Demikian juga halnya dengan pengelolaan bisnis pariwisata Pelabuhan Ratu yang ada di lokasi Provinsi Jawa Barat.

Pengembangan dan pengelolaan dunia bisnis pariwisata Pelabuhan Ratu tentu harus memperhatikan aspek antara lain lingkungan hidup. Dampak bisnis pariwisata yang tanpa memperhatikan aspek lingkungan hidup yakni

pengelolaan bisnis pariwisata Pelabuhan Ratu menjadi tidak terkontrol dan dari segi kelangsungannya tidak akan bertahan lama.

Dalam rangka melaksanakan program Studi Kasus-1 (SK-1), pada semester VII. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul *Pengembangan Pariwisata Pelabuhan Ratu Jawa Barat Dilihat Dari Aspek Lingkungan Hidup*

Proses penciptaan aneka ragam kegiatan pariwisata seharusnya berbarengan dengan pemeliharaan lingkungan hidup, karena lingkungan hidup memang menyangkut semua aspek kehidupan, termasuk kehidupan manusia sendiri. Permasalahan lingkungan hidup sebenarnya sudah berlangsung sejak dulu, namun akhir-akhir ini mulai diperbincangkan lagi oleh berbagai kalangan terutama kalangan pemerhati lingkungan hidup.

Pada dasarnya masalah lingkungan hidup yang terjadi karena adanya pembangunan ekonomi selama tiga dekade terakhir menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang memprihatinkan yang antara lain: Pertama, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, seperti hutan, berdampak negatif keanekaragaman hayati dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Kedua, masalah lingkungan hidup lainnya pencemaran udara, air dan tanah oleh limbah industri, domestik.

Mendatangkan wisatawan yang banyak belum tentu membawa keuntungan secara positif. Bila dilihat dari hasil devisa yang dihasilkan, mungkin dapat dikatakan usaha itu berhasil, tetapi kalau dilihat dari kaca mata lingkungan hidup dan dampak yang ditimbulkannya, semakin banyak wisatawan datang, semakin banyak membahayakan lingkungan hidup.

Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki potensi sangat besar di bidang pariwisata yakni dengan adanya Pelabuhan Ratu. Hal ini dapat diakui dengan ditempatkannya Pelabuhan Ratu oleh Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu sektor pariwisata untuk menambah devisa atau pendapatan daerah, di samping usaha-usaha lain di bidang bisnis ekonomi dan hasil-hasil pertanian. Dilihat dari

tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan, tingkat penerimaan daerah dari berbagai sektor memperlihatkan kontribusi yang makin meningkat setiap tahun.

Berkaca pada pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi di negara-negara lain, Permasalahan yang terkadang muncul dalam bisnis wisata adalah jumlah wisatawan yang datang melebihi penduduk yang menempati lokasi wisata tersebut. Akibat dari hal itu lingkungan hidup jadi terganggu.

Selain itu dampak negatif dari pengembangan lokasi wisata dilihat dari aspek lingkungan hidup adalah terjadinya perubahan ekosistem lingkungan hidup. Pembangunan hotel-hotel dan tempat-tempat rekreasi tanpa mempertimbangkan analisa dampak lingkungan hidup (AMDAL) justru akan merusak lingkungan hidup dari lokasi wisata tersebut. Sekitar lokasi obyek wisata tersebut ada penambangan pasir yang dilakukan secara terus menerus, bukan tidak mungkin akan berakibat pengikisan tanah/abrasi. Di Indonesia AMDAL dapat dilihat dalam undang-undang lingkungan hidup yakni UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan hidup.

Kalau hal ini dibiarkan tanpa ada memperhatikan aspek-aspek pengembangan lokasi wisata dan usaha pencegahan, dapat dibayangkan aset pariwisata tersebut akan habis nilainya dan semakin tidak berharga lagi. Gejala yang nyata-nyata merugikan tersebut, idealnya pemerintah harus mempunyai kesadaran untuk segera bertindak dan memperbaiki pelestarian lingkungan hidup di daerah tujuan wisata (DTW). Demikian juga halnya dengan Pemerintah Jawa Barat sebagai pihak pengembang lokasi wisata Pelabuhan Ratu segera mengantisipasi hal tersebut.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengembangan pariwisata Pelabuhan Ratu Jawa Barat dilihat dari aspek lingkungan hidup?
2. Usaha- usaha apa yang dapat dilakukan dalam pengembangan pariwisata Pelabuhan Ratu Jawa Barat dilihat dari aspek lingkungan hidup?

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran dan uraian yang jelas tentang pengembangan pariwisata Pelabuhan Ratu Jawa Barat dilihat dari aspek lingkungan hidup.
2. Memberikan solusi yang tepat menghadapi permasalahan yang timbul dalam pengembangan pariwisata Pelabuhan Ratu Jawa Barat dilihat dari aspek lingkungan hidup.

Sementara manfaat penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yakni: Pertama, secara teoritis, yakni untuk pengembangan ilmu pengetahuan dunia pariwisata terutama yang ada hubungannya dengan mata kuliah *Human Resources* dan *Environment Impact Assessment*. Kedua, secara praktis, memberikan masukan kepada Pemerintah Jawa Barat dan masyarakat sekitar untuk memanfaatkan lokasi Pelabuhan Ratu.

2. METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan umum UU No 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, berbunyi sebagai berikut: Pertama, Pasal 1 ayat (3) berbunyi pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Kedua, Pasal 1 ayat (4) berbunyi kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

Selanjutnya dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Sesungguhnya dengan adanya kegiatan pariwisata akan timbul hasrat dan keinginan untuk nenelihara semua aset dimaksud. Industri pariwisata dikatakan sebagai industri tanpa cerobong asap yang bebas dari polusi dan pencemaran lainnya.

Kegiatan pariwisata banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, transportasi dan komunikasi, akan tetapi tempat-tempat yang menjadi pemusatan wisata itu selalu menghendaki suasana yang nyaman, bersih dan aman dan memiliki lingkungan yang terpelihara sehingga tercipta suasana harmonis dan menyenangkan bagi semua pengunjung (Oka Yoeti, 1997: 34).

Begitu pentingnya pengembangan pariwisata di Indonesia, maka pemerintah melalui Ketetapan MPR mempertegas dan memperbaharui Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1988 tentang pariwisata dan menetapkan keberadaan sektor pariwisata dalam GBHN, antara lain: pengembangan pariwisata dilanjutkan dan ditingkatkan dengan mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi kepariwisataan menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk penerimaan devisa, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, terutama bagi masyarakat setempat, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan alam dan nilai budaya bangsa.

Dalam pengembangan pariwisata seperti yang dicantumkan dalam GBHN tersebut, tetap dijaga terpeliharanya kepribadian bangsa dan kelestarian serta mutu lingkungan hidup. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta berbagai usaha pariwisata yang kecil, menengah dan besar agar dapat saling menunjang.

Melihat kenyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengembangan bisnis pariwisata merupakan salah satu pembangunan yang berkelanjutan. Otto Soemarwoto (2006: 9) berpendapat pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan ekonomi yang harus berwawasan lingkungan hidup, karena hakikat pembangunan berkelanjutan adalah integrasi antara lingkungan hidup dan pembangunan. Lingkungan hidup tidak berdiri sendiri melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan. Sementara pendapat dari Emil Salim (1993: 184-185), lebih menggunakan istilah

pembangunan berkesinambungan yakni pembangunan yang mengharuskan kita mengelola sumber daya alam secara serasi mungkin. Hal ini berarti bahwa sumber-sumber daya alam dapat diolah asalkan dilakukan secara rasional dan bijaksana.

Dengan demikian pengembangan bisnis pariwisata merupakan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Pengembangan atau pembangunan bisnis pariwisata dilakukan untuk menjangkau keseimbangan pengetahuan yang ada pada seluruh anggota masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan yang sama, sehingga dengan demikian dapat tercipta pengetahuan yang sama/mirip terhadap masing-masing lingkungan hidup.

1. Penelitian tentang pengembangan pariwisata Pelabuhan Ratu Jawa Barat dilihat dari aspek lingkungan hidup merupakan penelitian dengan menggunakan observasi. Syaifudin Azwar (2007: 19), obyek observasi adalah fenomena-fenomena yang dibiarkan terjadi secara alamiah. Observasi dapat dilakukan dengan dua arena (*setting*) yang berbeda yaitu: Pertama, lingkungan alamiah berupa dunia nyata. Kedua, lingkungan alamiah berupa tiruan.
2. Sumber data yang tersedia dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan yakni lokasi pantai Pelabuhan Ratu, berupa wawancara dengan narasumber. Sementara sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen yakni literatur-literatur, jurnal ilmiah, bahan internet.
3. Tempat dan lokasi penelitian adalah pantai Pelabuhan Ratu yang terletak di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan mulai pada tanggal 9 sampai 13 bulan November tahun 2009.

Pada dasarnya keunikan dan keistimewaan pantai Pelabuhan Ratu tetap menjadi daya tarik yang tiada duanya, bagi wisatawan. Keindahan panorama alam perairan pinggiran laut selatan berpadu dengan cerita mistik tentang seorang Ratu penguasa Laut Selatan adalah fenomena yang tidak dimiliki oleh pantai lain.

Pelabuhan Ratu terletak di daerah sekitar 60 km ke arah selatan dari Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Dengan terbukanya akses jalan ke obyek wisata lain, maka dalam beberapa tahun terakhir ini wisatawan yang mau berkunjung ke Pelabuhan Ratu mengalami penurunan, karena lebih memilih Pantai Carita sebagai obyek wisata yang dituju. Hal ini disebabkan lokasi Pantai Carita di Provinsi Banten lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pantai Pelabuhan Ratu terbentang cukup panjang menghadap lautan Indonesia bagian selatan. Pantai ini terdiri dari pantai landai berpasir, pantai bebatuan, pantai curam, dan pantai dengan karang-karang terjal. Di sekitar pantai Pelabuhan Ratu terdapat persawahan penduduk yang berbatasan dengan garis laut.

Di lokasi Pelabuhan Ratu terdapat obyek wisata kuliner, wisata religius, dan wisata mistis. Selain itu konon ada juga pertapaan Bung Karno (mantan Presiden RI pertama), tepatnya di Gunung Mulya sebelah utara depan Pantai Batu Karang Hawu. Mantan Presiden pertama RI tersebut, mendirikan tempat peristirahatan di Tenjo Resmi pada tahun 1960. Selain itu Bung Karno mendirikan toko serba ada Sarinah dan membangun salah satu hotel mewah yang di beri nama Samudra Beach Hotel, yang pembangunannya bersamaan juga dengan Hotel Indonesia dan Bali Beach Hotel. Pelabuhan Ratu dikenal juga dengan mitos Nyi Roro Kidul.

Di sekitar pantai Pelabuhan Ratu terdapat beberapa lokasi wisata lainnya, antara lain Pantai Karanghawu, yang letaknya sekitar 20 km dari pusat kota Pelabuhan Ratu. Selain itu sekitar 17 km dari pantai Pelabuhan Ratu terdapat sumber air panas di Cisolok yang airnya mengandung belerang yang tinggi dan berguna bagi kesehatan.

Pantai Pelabuhan Ratu dikenal sebagai tempat bertelur dan berkembang biak Penyu yang konon terancam kepunahannya. Penyu sebagai binatang yang dilindungi di dunia. Namun kenyataan Penyu itu sering ditangkapi untuk dimakan dagingnya, sementara badan dan kulitnya dijadikan cendera mata serta telurnya diambil untuk dikonsumsi masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengembangan Pariwisata Pelabuhan Ratu Jawa Barat Dilihat Dari Aspek Lingkungan Hidup

Pada dasarnya apabila kita menelusuri secara lebih jauh tentang kegiatan bisnis pariwisata mengandung 3 (tiga) aspek dasar, yakni: Pertama, pariwisata sebagai suatu bentuk perdagangan jasa. Kedua, hubungan kegiatan bisnis pariwisata dengan kebudayaan dan lingkungan hidup. Ketiga, hukum yang mengatur kegiatan perdagangan jasa pariwisata dan hubungan pariwisata dengan kebudayaan.

Saat ini melihat permasalahan bisnis pariwisata tidak dapat dilepaskan dari pandangan bahwa bisnis pariwisata merupakan bagian sumber daya alam, sehingga kebijakan tentang pengelolannya memerlukan kerja sama berbagai pihak terkait dalam koordinasi yang efektif.

Pengaruh globalisasi membuat kegiatan bisnis pariwisata harus berorientasi kepada prinsip-prinsip kebijakan bisnis pariwisata yang berkelanjutan. Pengabaian terhadap hal ini akan berdampak negatif, tidak hanya dalam skala regional tetapi juga dalam skala global, mengingat saling ketergantungan yang semakin besar antar masyarakat internasional terutama dalam dunia pariwisata.

Berdasarkan hal itu, kiranya pengembangan lokasi wisata pantai Pelabuhan Ratu harus dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek lain seperti aspek lingkungan hidup. Dengan menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup lokasi wisata pantai Pelabuhan Ratu, maka obyek wisata tersebut akan tetap indah dan menciptakan suasana yang sejuk bagi pengunjung yang datang.

Obyek wisata pantai Pelabuhan Ratu dalam pengelolaan dan pengembangannya diharapkan dapat berlangsung terus menerus, sehingga dapat menjangkau masa kini dan masa yang akan datang. Hal ini disebabkan bahwa obyek wisata pantai Pelabuhan Ratu bukan hanya milik pemerintah

sekarang atau masyarakat sekarang, tetapi menjadi milik dan harta dari pemerintah dan masyarakat secara turun temurun.

Kenyataan di lapangan sungguh sangat disayangkan bahwa disekitar pantai Pelabuhan Ratu ada praktek eksploitasi sumber daya alam berupa kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan kerusakan alam. Penambangan pasir yang dilakukan secara terus menerus akan menyebabkan pengikisan tanah atau abrasi dan akibatnya lokasi pantai yang menjadi tempat penambangan pasir akan bertambah luas, sehingga merusak lingkungan sekitarnya.

Ditambah lagi dengan akses jalan-jalan yang sudah mulai rusak dan memprihatinkan akibat dilalui oleh truk-truk besar dan alat-alat berat untuk mengangkut pasir. Padahal jalan ini merupakan sarana utama dari transformasi masyarakat dan jalan utama menuju lokasi wisata pantai Pelabuhan Ratu. Kondisi demikian tentu akan menciptakan suasana yang tidak nyaman atau terganggunya wisatawan yang mau berkunjung ke pantai Pelabuhan Ratu.

Alasan utama dari adanya penambangan pasir di lokasi pantai Pelabuhan Ratu adalah untuk menambah penghasilan masyarakat, karena pasir ini akan dijual dan banyak yang membutuhkan untuk dijadikan bahan bangunan. Penjualan hasil penambagna pasir ini bahkan sampai ke luar kota. Memang harus diakui bahwa masyarakat di sekitar pantai Pelabuhan Ratu memerlukan juga kebutuhan hidup, tetapi pemenuhan kebutuhan hidup tersebut jangan sampai merusak atau mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Segi ekonomi memang kebutuhan masyarakat akan terpenuhi, tapi dari segi kelestarian lingkungan hidup lokasi pantai Pelabuhan Ratu tentu akan berbahaya, karena lingkungan lokasi ini akan menjadi rusak, akibatnya kelangsungan daerah tujuan wisata (DTW) Pelabuhan Ratu yang berkelanjutan tidak akan pernah terwujud, baik masa kini maupun masa yang akan datang tidak terjaga lagi.

Selain kerusakan lingkungan akibat adanya penambangan pasir tersebut, di lokasi penelitian yakni pantai Pelabuhan Ratu ditemukan juga adanya ancaman kepunahan dari salah satu binatang yang dilindungi di Indonesia yakni Penyu. Sesungguhnya binatang Penyu merupakan bagian dari ekosistem lingkungan hidup dari obyek wisata pantai Pelabuhan Ratu, sehingga tidak salah kalau masyarakat di sekitarnya segera sadar untuk menjaga kelestarian binatang Penyu yang akan punah tersebut.

Di masa yang akan datang, bisnis pariwisata dapat dilakukan pengelolaannya secara lebih komprehensif dengan memperhatikan nilai-nilai aspek hukum, budaya, dan lingkungan hidup serta aspek ekonomi.

Situasi demikian ditambah dengan kondisi lain yang terus berkembang seperti sejumlah masyarakat yang berpartisipasi semakin meluas, kegiatan bisnis pariwisata sebagian besar, bahkan cenderung seluruhnya menyertakan mitra asing atau berhubungan dengan pihak asing.

Dengan demikian pariwisata pantai Pelabuhan Ratu dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, memberikan perluasan kesempatan kerja serta yang tidak kalah penting adalah terciptanya lokasi pariwisata dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan pariwisata Pelabuhan Ratu memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.

Dalam Undang-Undang Propernas menetapkan kebijakan pengembangan pariwisata berdasarkan pendekatan sistem, utuh, terpadu, multi disipliner, partisipatoris, dengan kriteria ekonomis, teknis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam, dan tidak merusak lingkungan (Wyasa Putra d.k.k, 2003: 9).

Pada pokoknya dalam UU Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan, dinyatakan kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ketentuan undang-undang pariwisata tersebut mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pariwisata dilakukan dalam rangka: Pertama, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha. Kedua, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, sasaran pengembangan pariwisata Pelabuhan Ratu adalah kesinambungan antara masa lalu dan masa depan. Dalam artian diperlukan usaha untuk menghasilkan perlindungan dari kerusakan-kerusakan lingkungan hidup, sehingga dari masa ke masa dan bagaimanapun perkembangan globalisasi lokasi wisata Pelabuhan Ratu tetap terjaga dari kerusakan lingkungan hidup.

b. Usaha-Usaha Yang Dapat Dilakukan Dalam Pengembangan Pariwisata Pelabuhan Ratu Jawa Barat

Pengalaman yang dialami oleh negara-negara di dunia terhadap kerusakan lingkungan hidup terutama kerusakan lokasi obyek wisata, menyebabkan Pemerintah Indonesia berusaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dari pengembangan lokasi wisata. Belajar dari pengalaman negara-negara di dunia tersebut, maka Pemerintah Indonesia menetapkan usaha-usaha yang dapat dilakukan, baik melalui kebijakan ekonomi, kebijakan politik, kebijakan lingkungan hidup maupun kebijakan hukum.

Usaha-usaha dari pemerintah tersebut dapat berwujud antara lain dikeluarkannya kebijakan ekonomi berupa pola pengembangan bisnis pariwisata berbasis pola ekonomi masyarakat bawah, menengah dan masyarakat kalangan atas, kebijakan politik berupa adanya kemauan dari

pemerintah setempat untuk memperbaiki sarana dan prasarana obyek wisata, kebijakan lingkungan hidup berupa pengelolaan dan pengembangan lingkungan hidup, kebijakan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Terjadinya kerusakan lingkungan hidup di lokasi dan sekitar daerah wisata, pada dasarnya mengakibatkan kemungkinan terjadinya perubahan pada nilai-nilai yang selanjutnya berpengaruh pada terjadinya perubahan norma-norma peradaban masyarakat itu sendiri. Perubahan orientasi nilai ini dapat menjelma dalam wujud pergeseran nilai, persengketaan dan perbenturan (Yuwono dan Nursal, 2006: 38).

Hal ini yang mendorong Pemerintah Indonesia menentukan visinya di bidang lingkungan hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004- 2009, yakni membaiknya fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada pengaruh utama prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor bidang pembangunan, dengan prioritas perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pada dasarnya Pemerintah Indonesia telah menentukan 2 (dua) program pembangunan disektor kebudayaan dan pariwisata, yakni: Pertama, program pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Program ini diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai budaya guna memperkuat ketahanan bangsa. Kedua, program pengembangan pariwisata. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan kegiatan berbasis masyarakat.

Adapun tujuan program pelestarian dan pengembangan kebudayaan adalah untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat akan keragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya

masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dan memperkuat ketahanan bangsa.

Kebijakan pembangunan yang berkesinambungan bukanlah suatu upaya untuk menghentikan perkembangan lebih lanjut dalam masyarakat. Bukan pula semacam *konservasi* lingkungan hidup dan budaya, melainkan pembangunan terkendali yang mempertimbangkan generasi yang lalu dan generasi yang akan datang.

Dengan demikian mempertimbangkan bisnis pariwisata Pelabuhan Ratu dari sudut pandang pembangunan yang berkesinambungan, maka ada tiga unsur kualitas kunci yang harus diperhatikan, yakni: Pertama, Kualitas nilai sejarah yang terjaga secara berkesinambungan terhadap daerah wisata Pelabuhan Ratu. Kedua, kualitas daerah wisata Pelabuhan Ratu dengan kehidupan lingkungan hidup masyarakat sekitarnya. Ketiga, kualitas dari kemauan pemerintah untuk tetap dan selalu menjaga daerah wisata Pelabuhan Ratu dari kerusakannya terutama dari kerusakan lingkungan hidup.

Ketiga kualitas unsur di atas idealnya mempunyai hubungan timbal balik yang *dikontruksikan* antara ketiganya yang mencerminkan nilai-nilai filosofi dari bisnis pariwisata sendiri yang mencerminkan kesinambungan. Hal ini penting, karena bukan tidak mungkin dalam pengembangan bisnis pariwisata Pelabuhan Ratu hanya di dorong pada kebutuhan sesaat, tanpa memperhatikan kelangsungan dari daerah wisata Pelabuhan Ratu terutama dari aspek lingkungan hidup. Lingkungan hidup daerah maupun sekitar Pelabuhan Ratu harus tetap terjaga kelestariaannya. Pada umumnya kerusakan lingkungan hidup merupakan awal dari kehancuran lokasi wisata itu sendiri.

4. PENUTUP

Berdasarkan urian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengembangan pariwisata pantai Pelabuhan Ratu harus memperhatikan aspek lingkungan hidup. Peranan aspek lingkungan hidup perlu dalam rangka menjaga dan melestarikan kelestarian lingkungan hidup pantai Pelabuhan Ratu itu sendiri, sehingga pengembangan wisata Pelabuhan Ratu merupakan bagian dari pembangunan yang berkelanjutan, yang berarti dapat dilaksanakan secara terus menerus dari masa ke masa.
2. Dalam rangka pengembangan pariwisata Pelabuhan Ratu oleh Pemerintah setempat dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dapat dilakukan dengan dengan usaha-usaha yang antara lain dengan menetapkan kebijakan pengembangan wisata Pelabuhan Ratu sesuai dengan pola pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pelaku pariwisata yang terlibat dalam pengembangan wisata pantai Pelabuhan Ratu, harus memperhatikan aspek lingkungan hidup. Hal ini perlu dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dari pantai Pelabuhan Ratu itu sendiri. Kepada masyarakat yang melakukan penambangan pasir harus memperhatikan dampak dari perbuatan mereka tersebut yang berakibat kerusakan alam. Begitu juga dengan masyarakat pemburu binatang Penyu harus memperhatikan kelangsungan hidup dari binatang tersebut, karena Penyu merupakan binatang yang dilindungi dan dijaga kepunahannya.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi khususnya dan Provinsi Jawa Barat pada umumnya supaya lebih meningkatkan kelestarian lingkungan pantai Pelabuhan Ratu tidak hanya melalui pijakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, tetapi juga perlu membuat

kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengembangan wisata Pelabuhan Ratu.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Syaifudin, 2007, *Metode Penelitian*, Cetakan Ketujuh, Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta s
- Salim, Emil, 1993, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Cetakan Kedua, LP3ES, Jakarta
- Soemarwoto, Otto, 2006, *Pembangunan Berkelanjutan Antar Konsep Dan Realitas*. Unpad. Bandung
- Yoeti, Oka A, 1997, *Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata*, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita. Jakarta
- Yuwono Imam dan Nursal, 2006, *Kontaminasi Antar Budaya Pada Era Globalisasi*, Jurnal Ilmiah Pariwisata Vol 11 Nomor 1 Bulan Maret. Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Jakarta.
- Wyasa Putra, Ida Bagus, D.K.K., 2003, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Cetakan Pertama, Penerbit Refika Aditama. Bandung.
- MPR, 1999, *Tap MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Nomor IV/MPR/Tahun 1999*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang *Kepariwisata*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang *Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004*
- , 2009, *Data SK-I (Pelabuhan Ratu, Suka Bumi)*